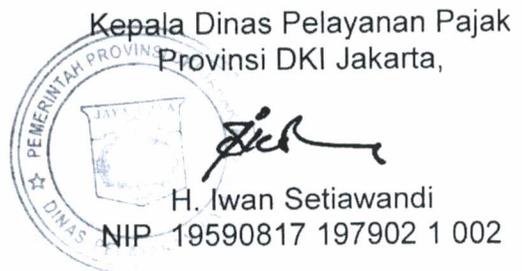


3. Kepala Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan/ Pengenaan PBB-P2 di bidang Pendidikan Swasta.
4. Dinas Pelayanan Pajak/Suku Dinas Pelayanan Pajak mengirimkan fotokopi surat permohonan wajib pajak, hasil penelitian/identifikasi dan Surat Keputusan Pembetulan/ Pengenaan PBB-P2 atas SD Swasta, SMP Swasta, SMA Swasta dan Sederajat, Perguruan Tinggi Swasta dan Pendidikan Informal sesuai kewenangannya kepada Unit Pelayanan Pajak Daerah untuk diproses lebih lanjut.
5. Berdasarkan berkas yang dikirimkan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Unit Pelayanan Pajak Daerah menginput ke dalam sistem jenis pelayanan pengenaan/ pengurangan PBB-P2.
6. Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah menerbitkan SPPT PBB-P2 pengenaan/ pengurangan sebagai pengganti SPPT PBB-P2 sebelumnya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari.
7. Unit Pelayanan Pajak Daerah Mendokumentasikan SPPT PBB-P2 dan Surat Keputusan Pembetulan/ Pengenaan PBB-P2

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta,



H. Iwan Setiawandi
NIP 19590817 197902 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak
2. Para Kepala Bidang Dinas Pelayanan Pajak



**DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jakarta, 23 Agustus 2013
Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak
Kota Administrasi
2. Kepala Bidang Peraturan dan Penyuluhan
3. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 47/SE/2013

TENTANG

**MEKANISME PELAYANAN PENGENAAN DAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI BIDANG PENDIDIKAN SWASTA**

Bahwa sehubungan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Bidang Pendidikan Swasta yang masih dalam proses pengundangan juncto Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 5 Tahun 2013, dan mempertimbangkan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 Tahun 2013 yang segera berakhir, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Pelayanan permohonan pengenaan/pengurangan PBB-P2 untuk SD Swasta, SMP Swasta, SMA Swasta dan Sederajat, Perguruan Tinggi Swasta dan Pendidikan Informal yang telah masuk/diterima dapat diproses.
2. Dinas Pelayanan Pajak/Suku Dinas Pelayanan Pajak/Unit Pelayanan Pajak Daerah sesuai kewenangannya melakukan penelitian/identifikasi terhadap SD Swasta, SMP Swasta, SMA Swasta dan Sederajat, Perguruan Tinggi Swasta dan Pendidikan Informal berdasarkan permohonan pengenaan/pengurangan SPPT PBB-P2.